

EVALUASI PENGANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

Ferlintang Naya Ridha Nayla¹, Zhafirah Abadi², Eva Hany Fanida³, Melda Fadiyah Hidayat⁴

ferlintangnaya@gmail.com¹, abadizhafirah10@gmail.com², evafanida@unesa.ac.id³,
meldahidayat@unesa.ac.id⁴

Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi penganggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah. Penganggaran daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan publik yang harus dilaksanakan secara transparan, efektif, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, keterbatasan pengawasan, serta potensi ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, evaluasi terhadap proses penganggaran menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan pelaksanaan anggaran mampu mendukung terciptanya akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi terkait pengelolaan dan penganggaran keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan membandingkan berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi penganggaran daerah.

Kata Kunci: Evaluasi Penganggaran, Akuntabilitas Keuangan Daerah, APBD, Pemerintah Daerah, DKI Jakarta.

ABSTRACT

This study aims to analyze the evaluation of the DKI Jakarta Provincial Government's budgeting in realizing regional financial accountability. Regional budgeting is a crucial instrument in public financial management that must be implemented transparently, effectively, and accountably. However, in practice, various challenges remain, such as mismatches between budget planning and implementation, limited oversight, and potential inefficiencies in budget utilization. Therefore, an evaluation of the budgeting process is crucial to determine the extent to which budget policies and implementation support regional financial accountability. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through a literature review of scientific journals, books, and official documents related to regional financial management and budgeting in DKI Jakarta Province. Data analysis techniques were conducted by reviewing and comparing various sources to gain a comprehensive understanding of regional budgeting implementation.

Keywords: Budget Evaluation, Region Financial Accountability, APBD, Regional Government, DKI Jakarta.

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah pada zaman modern kini tak bisa terlepas dari tuntutan transparansi serta akuntabilitas terutamanya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan anggaran dapat kita anggap sebagai “jantung” dimana pemerintahan ini seluruh program dan kebijakan publik yang pada akhirnya bergantung perencanaan, alokasi dan realisasi anggaran. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memegang peran strategis besar mengingat besarnya juga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola. Oleh sebab itu setiap rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan dampak nyata sekaligus manfaat bagi masyarakat sebagai upaya mewujudkan tata kelola baik atau (good governance).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan berbagai sistem inovasi salah

satunya ialah melalui sistem Electronic Budgeting atau biasa disebut e-budgeting. Sistem ini muncul bukan tanpa alasan melainkan ada sebab akibat upaya respon terhadap kebutuhan proses penganggaran yang lebih transparan, efisien sekaligus minim kesalahan terutama jika dibandingkan dengan sistem manual yang sebelumnya bisa rawan kesalahan input maupun praktik nggak akuntabel (Purwohandoko et al., 2015). Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam penganggaran dimaksudkan untuk menyederhanakan birokrasi selama ini yang kita kenal kaku dan berbelit sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah (Wargadinata et al., 2022).

Kenyataannya implementasi e-budgeting ngga selalu sesuai harapan tentu dilapangan masih ditemui berbagai hambatan baik bersifat teknis maupun sistematis. Salah satu, permasalahan sering muncul ialah ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dengan realitasnya. Hal ini bisa disebabkan keterlambatan proses input data, alokasi anggaran dianggap kurang rasional sehingga pengelolaan ini harusnya lebih terstruktur sekaligus transparan memanfaatkan TIK terkadang faktor ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat integrasi data menjadi sulit tercapai (Rahman et al., 2019). Sampai fenomena alokasi dana dinilai tidak rasional menjadi bukti bahwa keberadaan sistem digital saja belum cukup menjamin sistem transparansi ini tanpa adanya pengawasan yang memadai.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD, e-budgeting seharusnya menjadi alat instrumen utama dalam menciptakan koordinasi antar instansi masih sering menjadi titik lemah yang menghambat efektivitas penganggaran tersebut (Elsye & Arisandi, 2022). Namun, ternyata memperlihatkan kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dengan apa yang sebenarnya yang sedang terjadi dilapangan (*das sein*) dalam kajian akademik kondisi ini biasanya disebut *gap analysis* dimana perbedaan antara konsep ideal dan implementasi. Secara regulasi penganggaran harusnya efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kesenjangan tersebut dipengaruhi bukan hanya faktor teknis aja melainkan ada juga kualitas sumber daya manusia, komitmen integritas serta struktur birokrasi belum sepenuhnya mendukung. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan termasuk penganggaran sangat dipengaruhi berbagai faktor seperti komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana serta struktur birokrasi yang ada (Siti & Eny, 2023). Meskipun e-budgeting telah diterapkan selama beberapa tahun tantangan sinkronisasi data dan koordinasi antar instansi masih menjadi pekerjaan disisi lain partisipasi publik dalam perencanaan yang dimana seharusnya bersifat *bottom-up* terbilang sangat rendah jadi masyarakat hanya melihat hasil akhir berupa angka tanpa memahami proses maupun substansi dibaliknya. Hal ini tentu berdampak pada kualitas akuntabilitas keuangan daerah secara keseluruhan nyatanya seringkali hanya disuguhkan angka aja tanpa memahami substansi.

Dari kondisi ini dapat dipahami bahwa permasalahan penganggaran tidak hanya terletak kecanggihan sistem aja melainkan kesiapan SDM yang mengelolanya. Sekarang teknologi yang paling maju sekalipun nggak akan bisa menjamin akuntabilitas keuangan daerah bila tidak didukung oleh integritas dan komitmen pelaksana (Natsir et al., 2023). Dinamika penganggaran DKI Jakarta yang kompleks dan terus berubah menuntut evaluasi berkelanjutan agar kesalahan serupa gabisa terulang lagi tiap siklus anggaran tahunan.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam efektivitas sistem e-budgeting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi

DKI Jakarta. Fokus utama menilai sejauh mana proses penganggaran dapat berjalan transparan, efisien yang terpenting bertanggung jawab bukan hanya sekedar memenuhi formalitas administratif akan tetapi disisi lain juga memberikan manfaat konkret bagi masyarakat serta bertujuan mengidentifikasi..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mendalami proses evaluasi penganggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegakkan akuntabilitas keuangan serta metode yang dipilih bersifat kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Mengingat fokusnya tidak hanya pada data statistik tapi pada deskripsi fenomena lapangan dengan prosedur, dinamika maupun hambatan dalam sistem penganggaran. Pendekatan deskriptif menyajikan gambaran tentang pelaksanaan sistem digital seperti smart planning bahkan e-budgeting oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Observasi difokuskan pada rentang waktu lima tahun terakhir yakni 2021 sampai 2025 (Elsye & Arisandi, 2022).

Dianggap mencerminkan kondisi keuangan daerah sejak masa pemulihan pasca pandemi hingga transisi ekonomi menjelang tahun 2026. Pada periode ini diharapkan dapat mengungkapkan pola konsisten pada kebijakan serta perubahan praktik penganggaran dimana seluruh data yang dipakai merupakan data sekunder bisa dipertanggung jawabkan. Melalui proses pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan menelaah dokumen terkait antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Laporan realisasi anggaran tersedia di Dasbor Keuangan DKI serta peraturan gubernur tentang penyusunan sekaligus pelaksanaan anggaran. Selain itu, ditambahkan sumber akademik seperti jurnal ataupun buku keuangan publik serta yang terakhir hasil penelitian sebelumnya membahas akuntabilitas dan efektivitas penerapan e-budgeting (Natsir et al., 2023).

Sumber ini dimaksudkan agar analisis tidak hanya bersifat subjektif aja melainkan berlandaskan teori kuat jadi pengumpulan data mengandalkan teknik dokumentasi dan studi sistematis yang menyoroti mekanisme kerja e-budgeting dan smart planning di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. Fokus utamanya terletak pada integrasi data mulai dari perencanaan hingga input akhir dalam sistem tingkat transparansi yang dihasilkan khususnya akses data bagi pemangku kepentingan. Hal ini terbilang penting menilai sejauh mana sistem digital dapat meminimalisir potensi penyimpanan pengelolaan (Rahman et al., 2022).

Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan jenis permasalahan seperti kendala teknis, kesiapan SDM bahkan hambatan koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjamin validitas penelitian menerapkan triangulasi sumber yakni membandingkan setiap informasi dengan sumber lain relevan. Penelitian kesesuaian antara laporan resmi pemerintah dengan temuan akademik serta liputan media kredibel mengenai isu penganggaran di DKI Jakarta. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif sekaligus menilai apakah implementasi sistem penganggaran digital benar-benar meningkatkan akuntabilitas atau masih sekedar formalitas administratif (Wargadinata et al., 2022).

Analisis data menggunakan model interaktif dimulai proses pengumpulan lalu reduksi data sebagai menyaring informasi relevan kemudian data disusun dalam narasi terstruktur agar mudah dipahami. Berdasarkan pola teridentifikasi menekankan kesenjangan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan realitas

implementasi sistem penganggaran digital di birokrasi DKI Jakarta (Siti & Eny, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap berbagai dokumen, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan realisasi anggaran, serta didukung oleh sumber akademik dan media yang kredibel dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025), terlihat bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam memperbaiki sistem penganggaran. Upaya ini tampak dari penerapan teknologi digital melalui e-budgeting dan smart planning yang secara bertahap menggantikan sistem pengelolaan anggaran yang sebelumnya masih bersifat manual. Kehadiran sistem tersebut tidak lagi sekadar menjadi alat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dalam proses penyusunan anggaran.

Jika ditelaah lebih lanjut, penerapan sistem digital ini membawa perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam aspek transparansi. Setiap proses penginputan anggaran kini terdokumentasi secara digital, sehingga dapat ditelusuri dengan jelas, baik dari segi waktu maupun pihak yang melakukan input. Kondisi ini tentu berbeda dengan sistem sebelumnya yang relatif sulit dilacak dan berpotensi membuka celah bagi praktik yang kurang transparan. Dengan adanya sistem ini, kemungkinan munculnya anggaran yang tidak jelas asal-usulnya dapat diminimalisasi atau setidaknya lebih mudah diawasi (Elsye dan Arisandi, 2022).

Selain itu, integrasi antara smart planning dengan dokumen perencanaan seperti RKPD hingga KUA-PPAS menunjukkan adanya peningkatan konsistensi kebijakan. Pada praktik sebelumnya, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan anggaran yang ditetapkan. Namun kini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan mengikuti alur perencanaan yang telah ditetapkan sejak awal. Program yang tidak tercantum dalam dokumen perencanaan tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem anggaran. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol agar kebijakan tetap sesuai dengan rencana yang telah disepakati (Wargadinata dkk., 2022).

Di sisi lain, keberadaan dasbor keuangan daerah menjadi salah satu bentuk keterbukaan informasi yang cukup penting. Melalui platform tersebut, berbagai pihak, termasuk masyarakat, dapat mengakses informasi anggaran dengan lebih mudah. Hal ini merupakan langkah positif dalam mendorong transparansi, meskipun pada kenyataannya tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang memadai terhadap data yang disajikan. Dengan demikian, keterbukaan informasi sudah tersedia, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan literasi publik terkait substansi anggaran.

Meski demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi sistem digital tersebut belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala teknis masih sering ditemukan, seperti gangguan sistem, keterbatasan fitur analisis, serta kurangnya integrasi antar aplikasi yang digunakan. Kondisi ini terkadang menyebabkan keterlambatan dalam proses input data serta ketidaksesuaian antara data perencanaan dan realisasi di lapangan.

Selain faktor teknis, tantangan lain yang cukup krusial berasal dari aspek sumber daya manusia. Dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan kemampuan antar aparatur OPD dalam mengoperasikan sistem digital tersebut. Tidak semua pegawai memiliki pemahaman yang sama terkait penggunaan e-budgeting maupun smart planning, sehingga dalam beberapa kasus, proses penganggaran hanya dilakukan untuk memenuhi tuntutan

administratif tanpa didukung analisis yang mendalam. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa kesiapan SDM merupakan faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital (Rahman dkk., 2022).

Permasalahan lain yang turut mempengaruhi efektivitas sistem adalah koordinasi antar OPD yang belum berjalan optimal. Walaupun secara sistem sudah terintegrasi, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara usulan program dengan prioritas pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan klasik seperti ego sektoral dan kurangnya sinkronisasi antar lembaga masih menjadi tantangan, meskipun teknologi telah digunakan sebagai alat utama.

Dari sisi partisipasi publik, proses perencanaan yang seharusnya bersifat bottom-up melalui mekanisme Musrenbang juga masih cenderung bersifat formalitas administratif. Masyarakat memang diberikan ruang untuk terlibat, namun keterlibatan tersebut belum sepenuhnya bermakna. Banyak masyarakat hanya mengetahui besaran anggaran tanpa memahami dasar pertimbangan di balik penetapannya. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang ada masih sebatas pada penyediaan informasi, belum sampai pada tahap pelibatan publik secara substantif (Siti dan Eny, 2023).

Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, maka langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan sudah berada pada arah yang tepat. Sistem digital yang diterapkan telah menyediakan fondasi yang mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan, khususnya dalam aspek pengawasan terhadap substansi kebijakan.

Sistem yang ada saat ini memang cukup efektif dalam mencegah kesalahan teknis, seperti kesalahan input atau duplikasi anggaran. Namun, sistem tersebut belum sepenuhnya mampu menilai apakah suatu program benar-benar memberikan manfaat yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain, sistem lebih unggul pada aspek administratif, tetapi masih lemah dalam menilai kualitas kebijakan. Oleh karena itu, ke depan evaluasi penganggaran tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga perlu menitikberatkan pada kualitas belanja dan dampaknya bagi masyarakat (Natsir dkk., 2023).

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem penganggaran berbasis digital di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, baik dari aspek teknis, kesiapan sumber daya manusia, maupun koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan sistem, serta penguatan mekanisme pengawasan agar tujuan digitalisasi penganggaran dapat tercapai secara optimal.

Gambar 1 Tren Anggaran Pengeluaran Belanja DKI Jakarta Periode 2010–2024



Sumber: Satudata.Jakarta.go.id

Gambar 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Menurut Sumber Penerimaan (milyar rupiah), 2022			
Budget and Realization of Government Revenues by Source of Revenues of DKI Jakarta Province, 2022 (billion rupiahs)			
Sumber Penerimaan/Source of Revenues	2022		
	1	Anggaran/Budget	Realisasi/Realization
I. Pendapatan/Revenues		77.746,03	67.287,72
A. Pendapatan Asli Daerah/ Pure Regional Income		55.612,22	45.609,75
1. Pajak Daerah/Regional Tax		45.700,00	40.273,23
2. Retribusi Daerah/ Regional Retribution		806,88	376,98
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan/ Profit from BUMD and Others		793,74	402,42
4. Lain-lain (PAD Yang Sah)/ Others		8.311,60	4.557,11
B. Pendapatan Transfer/ Transfer from Central Government		17.226,48	18.861,62
1. Bagi Hasil Pajak/ Tax Revenue		13.920,65	16.010,82
2. Bagi Hasil Sumber Daya/ Non Tax Revenue		42,49	51,27
3. Dana Alokasi Khusus		3.233,66	2.769,85
4. Dana Penyesuaian		29,68	29,68
C. Lain-lain Pendapatan yang sah		4.907,33	2.816,34
1. Pendapatan Hibah		4.907,33	2.816,34

Sumber/ Source : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta/ Local Government Board Fiscal Management of DKI Jakarta Province
Catatan/Note : *) Data Sementara/Temporary Data

Sumber: jakarta.bps.go.id

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan upaya yang cukup maju dalam meningkatkan transparansi keuangan daerah dengan menerapkan sistem digital seperti e-budgeting dan smart planning. Sistem ini telah terbukti mampu meningkatkan transparansi, memperbaiki keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, serta memudahkan proses pengawasan karena seluruh data tercatat secara sistematis. Selain itu, menggabungkan dengan dokumen perencanaan daerah juga membantu memperkuat pengawasan terhadap program-program yang diajukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Namun, penerapan sistem tersebut masih belum berjalan dengan sempurna. Masih ada beberapa hambatan yang mengurangi keberhasilan proses penganggaran, seperti batasan teknis dari sistem yang digunakan, kurangnya kerja sama yang baik antar lembaga, serta perbedaan kemampuan pegawai dalam menggunakan teknologi yang ada. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran masih terlihat hanya sebagai tata cara formal dan belum benar-benar memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan penganggaran daerah tidak

hanya ditentukan oleh sejauh mana sistem digital digunakan, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas SDM, integritas pelaksana, serta kerja sama yang baik antar lembaga. Evaluasi anggaran sangat penting agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya terlihat jujur dalam administrasi, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu secara rutin mengadakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur, khususnya dalam penggunaan sistem e-budgeting dan smart planning, agar pemanfaatannya tidak hanya bersifat administratif tetapi juga analitis dan strategis.

2. Penguatan koordinasi antar OPD

Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi untuk mengurangi ego sektoral serta memastikan keselarasan antara program yang diusulkan dengan prioritas pembangunan daerah.

3. Penyempurnaan sistem teknologi

Sistem e-budgeting dan smart planning perlu terus dikembangkan, baik dari segi fitur analisis, stabilitas sistem, maupun integrasi antar aplikasi, sehingga dapat meminimalisir kendala teknis dan meningkatkan efektivitas kerja.

4. Peningkatan kualitas pengawasan

Pengawasan tidak hanya difokuskan pada aspek administratif, tetapi juga harus menilai kualitas dan dampak program terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran inspektorat serta lembaga pengawas lainnya.

5. Mendorong partisipasi publik yang lebih substantif

Pemerintah perlu meningkatkan literasi masyarakat terkait anggaran serta membuka ruang partisipasi yang lebih bermakna, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses perencanaan dan penganggaran.

6. Fokus pada kualitas belanja daerah

Evaluasi penganggaran ke depan perlu menitikberatkan pada efektivitas dan manfaat program, bukan hanya pada tingkat penyerapan anggaran, agar setiap pengeluaran benar-benar memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Widyasa, A. S. (2024). Efektivitas penyusunan anggaran melalui sistem electronic budgeting pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta [Skripsi/Laporan Akhir, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. Repository IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/>
- Andhayani, A. (2020). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: E-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 183–193. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005>
- Elsye, R., & Arisandi, D. (2022). Implementasi sistem electronic budgeting di Kelurahan Krendang Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, 6(2), 101–117. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/557>
- Natsir, M., Yamin, N. Y., Saleh, F. M., Jamaluddin, & Rizaldi. (2023). Electronic participatory budgeting, budget emphasis, and job tension: Implications for managerial performance. *International Journal of Data and Network Science*, 7(4), 1463–1470. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.016>
- Purwohandoko, S., & Mustofa, A. (2015). The successful implementation of e-budgeting in public university: A study at individual level. *Journal of Applied Information Technology*, 6(3), 135–

139. <https://doi.org/10.12720/jait.6.3.135-139>
- Rahman, R. A. T., Irianto, G., & Rosidi, R. (2019). Evaluation of e-budgeting implementation in Provincial Government of DKI Jakarta using CIPP model approach. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1), 94–114. <https://doi.org/10.18196/jai.2001110>
- Wargadinata, E., Aly, E. S., & Alma'arif, A. (2022). Evaluation of Jakarta Province in information and technology management. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 453–464. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.453-464>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Tren anggaran pengeluaran belanja DKI Jakarta periode 2010–2024. Satudata Jakarta. <https://satudata.jakarta.go.id/>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2023). Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Menurut Sumber Penerimaan (Miliar Rupiah), 2022. BPS Provinsi DKI Jakarta. <https://jakarta.bps.go.id/>